POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL

Nurrizal Danadipa Pindo
NPP. 33.0754
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: dimaspindooo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dedy Pribadi Uang, S.STP, M.Si
Email: dedy@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *West Kotawaringin Regency has considerable economic potential; however, its level of fiscal independence remains relatively low. This condition is reflected in the relatively small contribution of Local Own-Source Revenue (*Pendapatan Asli Daerah/PAD*) compared to transfer revenues from the central government. In addition, various policies aimed at increasing PAD have not yet been able to significantly improve fiscal independence. This situation indicates a gap between the region's economic potential and the local government's ability to manage and optimize its own revenue sources independently.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the political will of the West Kotawaringin Regency Government in improving fiscal independence.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach. The analysis is based on Brinkerhoff's political will theory, supported by indicators proposed by Shen (2025), including initiative, policy priority, political mobilization, actor commitment, and sustainability of efforts. Data were collected through interviews, observation, and documentation.* ***Result:*** *The findings show that the political will of the West Kotawaringin Regency Government in improving fiscal independence has been demonstrated through various policies and programs, such as the digitalization of local taxes, optimization of PAD collection, and efforts to improve public services. In the dimensions of initiative and policy priority, the local government has shown positive progress through the formulation of revenue enhancement programs. In the dimensions of political mobilization and actor commitment, support from the local government and regional apparatus organizations has been evident, although implementation has not been fully consistent. Meanwhile, in the sustainability dimension, several challenges remain, including limited resources, suboptimal institutional capacity, and a high dependence on central government transfer funds. As a result, the region's fiscal independence remains at a low level.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the political will of the West Kotawaringin Regency Government in improving fiscal independence has been demonstrated, but its implementation has not yet been optimal due to various constraints affecting the effectiveness of local revenue enhancement policies.*

Keywords: *Fiscal Independence; Fiscal Policy; Local Government; Local Own-Source Revenue (PAD); Political Will.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun tingkat kemandirian fiskalnya masih tergolong rendah. Kondisi ini terlihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, berbagai kebijakan peningkatan PAD yang telah diterapkan belum mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan teori *political will* dari Brinkerhoff (2000) yang didukung oleh indikator dari Shen (2025), meliputi inisiatif, prioritas kebijakan, mobilisasi politik, komitmen aktor, dan keberlanjutan usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti digitalisasi pajak daerah, optimalisasi pemungutan PAD, serta upaya peningkatan pelayanan publik. Pada dimensi inisiatif dan prioritas kebijakan, pemerintah daerah telah menunjukkan langkah yang cukup baik melalui penyusunan program peningkatan pendapatan daerah. Pada dimensi mobilisasi politik dan komitmen aktor, dukungan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah telah terlihat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Sementara itu, pada dimensi keberlanjutan usaha masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori rendah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal telah berjalan, namun belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal; Kemandirian Fiskal; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; *Political Will*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting keberhasilan otonomi daerah karena menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki (Pratiwi & Nurjanah,2025).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi (Christia,2019). Namun demikian, berbagai daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Kondisi tersebut ditandai dengan

masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2014), ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat menyebabkan daerah kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan yang dimiliki sehingga menghambat terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada bantuan dan transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Zakiah,2022).

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, perdagangan, serta sektor pariwisata yang didukung oleh keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting yang dikenal hingga tingkat internasional. Besarnya potensi sumber daya alam dan ekonomi tersebut seharusnya mampu menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kemandirian fiskal. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Data APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021 PAD Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp280,45 miliar dengan pendapatan transfer mencapai Rp1,25 triliun dan rasio kemandirian fiskal sebesar 22,42%. Tahun 2022 rasio kemandirian fiskal meningkat menjadi 24,40%, kemudian menurun menjadi 23,52% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 26,62% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, rasio tersebut masih berada pada kategori rendah sehingga menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Rendahnya tingkat kemandirian fiskal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia (Dalisawintri et al,2025). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, salah satunya melalui program digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah baru mencapai Rp117,78 miliar atau sebesar 66,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp177,60 miliar. Selain itu, realisasi PAD hanya mencapai 86,46% dari target yang telah ditentukan. Masih terbatasnya penggunaan teknologi digital seperti tapping box, belum optimalnya integrasi sistem pembayaran digital, serta masih adanya pendataan objek pajak secara manual menjadi beberapa faktor yang menyebabkan optimalisasi PAD belum berjalan secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan

politik (*political will*) pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal. Menurut Shen (2025), *political will* merupakan tingkat komitmen para pengambil kebijakan dalam menetapkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kemandirian fiskal, *political will* menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan, mengalokasikan sumber daya, serta melaksanakan berbagai inovasi kebijakan guna meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah. Kondisi ini diduga berkaitan dengan belum optimalnya *political will* pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis **Political Will Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal**, sehingga dapat diketahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah, baik dari aspek keuangan, kelembagaan, maupun kebijakan publik. Penelitian terdahulu mengenai kemandirian fiskal umumnya berfokus pada analisis kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengaruh desentralisasi fiskal, serta pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD, efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif, teknis, dan finansial sehingga belum banyak menjelaskan faktor politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan peningkatan kemandirian fiskal. Di sisi lain, penelitian mengenai *political will* telah banyak digunakan dalam kajian administrasi publik, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, implementasi kebijakan publik, serta pembangunan daerah. Dalam berbagai penelitian tersebut, *political will* dipandang sebagai komitmen dan kesungguhan pemimpin maupun pengambil kebijakan dalam merumuskan, mendukung, dan melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Shen (2024) menjelaskan bahwa *political will* merupakan tingkat komitmen para pengambil kebijakan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan *political will* dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu terlihat pada masih minimnya kajian yang menempatkan *political will* sebagai faktor utama dalam menjelaskan keberhasilan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sebagian besar penelitian mengenai kemandirian fiskal hanya mengukur tingkat kemandirian melalui rasio keuangan, kontribusi PAD, tingkat efektivitas pajak daerah, maupun kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, penelitian

mengenai *political will* lebih banyak diarahkan pada isu reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji bagaimana komitmen politik pemerintah daerah memengaruhi perumusan kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif *political will* dengan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui kebijakan peningkatan PAD, penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah, serta dukungan kelembagaan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena bahwa daerah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit, perikanan, perdagangan, dan pariwisata melalui Taman Nasional Tanjung Puting yang dikenal hingga tingkat internasional. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah dan menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan data APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021–2024, rasio kemandirian fiskal berada pada kisaran 22,42% pada tahun 2021, meningkat menjadi 24,40% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 23,52% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 26,62% pada tahun 2024. Selain itu, realisasi pajak daerah tahun 2024 hanya mencapai Rp117,78 miliar atau sebesar 66,32% dari target Rp177,60 miliar, sedangkan realisasi PAD hanya mencapai 86,46% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis kemandirian fiskal dari aspek keuangan daerah, tetapi juga mengkaji peran *political will* pemerintah daerah sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan keuangan daerah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri sangat menentukan keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pariwisata, namun tingkat kemandirian fiskalnya masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Secara akademis, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan *political will* dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai kemandirian fiskal lebih banyak berfokus pada aspek keuangan daerah, analisis rasio keuangan, maupun optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, penelitian yang mengkaji bagaimana *political will* pemerintah daerah

berperan dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai hubungan antara komitmen politik pemerintah daerah dan keberhasilan implementasi kebijakan fiskal daerah. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi DPRD, organisasi perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal yang berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi *political will* yang memengaruhi upaya peningkatan kemandirian fiskal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akibatnya, berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan PAD berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak mampu menjawab akar permasalahan yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat tetap tinggi, menghambat optimalisasi potensi daerah, membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, serta mengurangi kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas *political will* pemerintah, kemandirian fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kebijakan publik dalam mendukung pembangunan daerah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua tema utama, yaitu penelitian yang berfokus pada *political will* pemerintah dalam implementasi kebijakan publik dan penelitian yang berfokus pada kemandirian fiskal daerah serta pengelolaan pendapatan daerah. Pada kelompok pertama, penelitian mengenai *political will* menunjukkan bahwa komitmen pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Mendrofa dan Sonuari (2025) mengkaji *political will* Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menemukan bahwa komitmen kepala daerah serta konsistensi program sosial menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun masih menghadapi kendala anggaran dan koordinasi antarlembaga (Mendrofa & Sonuari, 2025). Hasil yang relatif serupa juga ditemukan oleh Mastaldiah (2020) yang meneliti *political will* Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi stunting. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen politik yang kuat mampu mendorong integrasi program lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, meskipun implementasi di tingkat pelaksana masih menghadapi berbagai kendala (Mastaldiah, 2020).

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Yusri (2019) mengenai pengembangan *political will* pemerintah desa dalam memberdayakan petani aren di Koto Tuo Barat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa komitmen kepala desa berperan penting dalam penguatan kapasitas petani dan pemberian akses permodalan, walaupun koordinasi dan keberlanjutan program masih menjadi tantangan (Yusri, 2019). Azizah dan Mahmudah (2020) juga menemukan bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin, meskipun belum didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang optimal (Azizah & Mahmudah, 2020). Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Wijaya et al. (2023) menyimpulkan bahwa keberhasilan

pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif (Wijaya et al., 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat persamaan bahwa *political will* dipandang sebagai faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Namun demikian, objek kajian yang digunakan masih berfokus pada bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan stunting, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan *political will* dengan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pada kelompok kedua, penelitian mengenai kemandirian fiskal lebih banyak menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi PAD, dan pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal daerah. Penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011) menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat memang dapat meningkatkan kapasitas belanja daerah, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi meningkatkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga menghambat terwujudnya kemandirian fiskal (Murniasih & Mulyadi, 2011).

Selanjutnya, Priyono et al. (2020) menemukan bahwa desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah, belanja daerah, dan PAD memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Pulau Jawa (Priyono et al., 2020). Sementara itu, Hasanah et al. (2025) menunjukkan bahwa seluruh komponen PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan salah satu faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Hasanah et al., 2025). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada analisis hubungan antarvariabel keuangan, seperti PAD, transfer pemerintah pusat, belanja daerah, dan kinerja keuangan. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji dimensi politik yang berada di balik keberhasilan atau kegagalan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, aspek *political will* sebagai faktor yang dapat memengaruhi proses perumusan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi program peningkatan PAD masih belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan bahwa *political will* berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik dan bahwa optimalisasi PAD merupakan faktor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Namun, terdapat perbedaan fokus penelitian antara kajian *political will* yang umumnya berada pada sektor sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan kajian kemandirian fiskal yang lebih menekankan aspek keuangan daerah. Keterbatasan penelitian sebelumnya terletak pada masih minimnya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam satu kajian yang komprehensif. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dengan mengkaji secara mendalam bagaimana *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek kebijakan sosial atau analisis keuangan daerah secara terpisah, penelitian ini menghubungkan dimensi *political will* dengan upaya peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan keuangan daerah

serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komitmen politik pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas *political will*, kebijakan publik, maupun kemandirian fiskal daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji *political will* dalam konteks kesejahteraan sosial, penanggulangan stunting, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, penelitian mengenai kemandirian fiskal daerah umumnya lebih berfokus pada aspek keuangan daerah, seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, desentralisasi fiskal, serta analisis rasio keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara *political will* pemerintah daerah dan peningkatan kemandirian fiskal masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek penelitian, yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maupun penggunaan teori *political will* yang dikemukakan oleh Shen (2024), tetapi juga pada upaya mengintegrasikan perspektif politik dan fiskal dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan peningkatan kemandirian fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi daerah atau efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen politik pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, membangun dukungan kelembagaan, dan mengimplementasikan program peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Kontribusi ilmiah yang ditawarkan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *political will* berperan sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Jika penelitian terdahulu cenderung memandang kemandirian fiskal dari perspektif ekonomi dan keuangan daerah, maka penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan *political will* sebagai elemen yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya merupakan hasil dari kemampuan fiskal daerah, tetapi juga merupakan hasil dari komitmen politik pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kajian *political will* dengan mengaplikasikan indikator *authority* (otoritas), *capacity* (kapasitas), dan *legitimacy* (legitimasi) yang dikemukakan oleh Shen (2024) dalam konteks peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selama ini, indikator-indikator tersebut lebih banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik secara umum, sedangkan penerapannya dalam konteks pengelolaan fiskal daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pemahaman mengenai bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam mendukung keberhasilan kebijakan peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa *political will* merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui dimensi *authority*, *capacity*, dan *legitimacy*. Penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah berupa perluasan kajian *political will* ke dalam ranah kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan ekonomi dan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan keuangan daerah, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara komitmen politik pemerintah daerah dan upaya mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal, termasuk bagaimana komitmen politik, kebijakan, serta tindakan pemerintah daerah diwujudkan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menggambarkan kondisi yang terjadi secara alamiah dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses, faktor pendukung, serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Selain itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai *political will* pemerintah daerah berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan lokus penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kemandirian fiskal. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2026, yang meliputi kegiatan observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, serta analisis data penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan terkait pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kemandirian fiskal. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang yang terdiri atas satu informan kunci, empat informan utama, dan dua informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemilihan Kepala Bapenda sebagai informan kunci didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Kepala Bapenda memiliki penguasaan informasi yang komprehensif mengenai kondisi penerimaan daerah, strategi optimalisasi PAD, berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, Kepala Bapenda dipandang sebagai informan yang

paling relevan untuk memberikan informasi utama mengenai *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

Adapun informan utama terdiri atas Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat. Informan utama dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Sementara itu, informan pendukung terdiri atas dua orang pejabat teknis atau staf yang menangani bidang pengelolaan pendapatan daerah dan perencanaan keuangan daerah. Informan pendukung berfungsi untuk memberikan informasi tambahan, klarifikasi data, serta memperkuat informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama. Dengan demikian, peran masing-masing kategori informan berbeda sesuai dengan tingkat kewenangan, penguasaan informasi, dan kontribusinya terhadap kebutuhan data penelitian. Informan kunci berperan sebagai sumber informasi utama terkait fokus penelitian, informan utama berperan memberikan informasi mengenai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan informan pendukung berperan dalam memberikan data pelengkap dan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan dengan *political will* pemerintah daerah. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas organisasi, tetapi melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program digitalisasi pajak dan retribusi daerah, mekanisme pelayanan pembayaran pajak daerah, koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta berbagai bentuk dukungan kelembagaan yang diberikan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan dan kondisi lapangan yang mendukung analisis terhadap *political will* pemerintah daerah.

Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan APBD, laporan realisasi PAD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan kinerja perangkat daerah, notulen rapat, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu Kepala Bapenda, Asisten III Sekretariat Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappedalitbang, serta informan pendukung lainnya untuk mengetahui tingkat konsistensi data yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, dan data dokumentasi. Sebagai contoh, informasi mengenai capaian PAD dan pelaksanaan program peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi dengan

dokumen APBD, laporan realisasi PAD, serta hasil observasi lapangan. Selain itu, informasi mengenai implementasi program digitalisasi pajak daerah dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung dan dokumen kebijakan yang relevan. Transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi penelitian secara rinci sehingga memungkinkan penelitian diterapkan pada konteks lain yang serupa. Dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian untuk memastikan konsistensi pelaksanaan penelitian. Sementara itu, konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data lapangan dan bukan hasil subjektivitas peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun berdasarkan dimensi *political will* yang digunakan dalam penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai *political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *political will* dari Shen (2024) yang meliputi dimensi *authority*, *capacity*, dan *legitimacy*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori *political will* yang dikemukakan oleh Shen (2024). Menurut Shen, *political will* dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu *authority* (otoritas), *capacity* (kapasitas), dan *legitimacy* (legitimasi). Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kewenangan, kemampuan, dan dukungan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3.1. *Political will* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan daerah

3.1.1 *Authority* (Otoritas)

Dimensi *authority* berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan, mengambil keputusan strategis, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Shen (2024), *authority* tidak hanya menunjukkan adanya kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menggunakan kewenangan tersebut secara efektif dalam mendorong perubahan dan mencapai target pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu instrumen utama penguatan kemandirian fiskal daerah. Komitmen tersebut tercermin melalui pembentukan Tim Optimalisasi PAD yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Pembentukan tim tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai sektor dalam satu kerangka kebijakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah.

Hasil observasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga menunjukkan adanya koordinasi yang dilakukan secara rutin antara perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas capaian target penerimaan daerah, tetapi juga mengevaluasi hambatan yang dihadapi serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah tidak hanya digunakan dalam bentuk penetapan kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti, peningkatan PAD telah menjadi salah satu prioritas dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun dokumen penganggaran tahunan. Integrasi target PAD ke dalam dokumen perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menempatkan penguatan kapasitas fiskal sebagai agenda strategis pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Shen (2024) yang menyatakan bahwa keberadaan *authority* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan kewenangan formal menjadi kebijakan yang konkret dan terukur. Dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Barat, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi telah digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan menuju kondisi fiskal yang lebih mandiri. Dari sudut pandang pembangunan daerah, penggunaan kewenangan tersebut memiliki arti penting karena kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pemerintah pusat. Semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin luas ruang fiskal yang dimiliki untuk membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam menggunakan otoritasnya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari *political will* yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan objek pajak tertentu dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan *authority* saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan kebijakan apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan dan legitimasi yang memadai. Dengan demikian, dimensi *authority* dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup kuat karena pemerintah daerah telah mampu memanfaatkan kewenangannya untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan peningkatan PAD secara sistematis.

3.1.2 *Capacity* (Kapasitas)

Dimensi *capacity* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Menurut Shen (2024), *capacity* mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, teknologi, sistem kelembagaan, serta kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta pengembangan pelayanan publik yang lebih efisien. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya kapasitas kelembagaan sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan peningkatan PAD. Hasil observasi

menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan berbagai aplikasi pendukung administrasi perpajakan juga membantu pemerintah dalam melakukan pendataan, pengawasan, dan pelaporan penerimaan daerah secara lebih akurat.

Peneliti juga menemukan penggunaan *tapping box* pada sejumlah objek pajak, khususnya sektor usaha yang memiliki potensi penerimaan pajak cukup besar. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengawasan transaksi secara lebih transparan sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Kehadiran teknologi ini menunjukkan adanya transformasi pengelolaan pendapatan daerah dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis data. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung digitalisasi pelayanan perpajakan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi telah didukung melalui penyediaan sumber daya yang memadai.

Dalam perspektif Shen (2024), kapasitas kelembagaan yang kuat merupakan salah satu indikator utama keberadaan *political will*. Pemerintah yang memiliki kemauan politik yang kuat tidak hanya menetapkan target kebijakan, tetapi juga menyediakan sumber daya yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah berupaya memenuhi aspek tersebut melalui modernisasi sistem pelayanan, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Secara analitis, penguatan kapasitas ini memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia memungkinkan aparatur pemerintah bekerja lebih profesional dalam melakukan pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan kapasitas yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, belum seluruh wajib pajak mampu beradaptasi dengan sistem digital yang diterapkan serta masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang. Berdasarkan indikator yang dikemukakan Shen (2024), kapasitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikategorikan cukup baik karena telah menunjukkan kemampuan dalam menyediakan sumber daya, memanfaatkan teknologi, serta membangun sistem kelembagaan yang mendukung optimalisasi PAD dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

3.1.3 *Legitimacy* (Legitimasi)

Dimensi *legitimacy* berkaitan dengan tingkat penerimaan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Menurut Shen (2024), keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan dan kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terdampak. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya membangun legitimasi kebijakan peningkatan PAD melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan telah mengedepankan prinsip kemudahan akses, keterbukaan informasi, dan transparansi prosedur pelayanan. Berbagai media informasi juga digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Strategi komunikasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Temuan dokumentasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan penerimaan daerah.

Dalam perspektif Shen (2024), legitimasi yang kuat menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin besar kemungkinan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, dukungan kepala daerah, organisasi perangkat daerah, serta berbagai upaya peningkatan pelayanan menunjukkan adanya fondasi legitimasi yang cukup kuat. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi yang dimiliki pemerintah daerah masih menghadapi beberapa tantangan. Masih terdapat sebagian wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah karena dianggap menambah beban ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi merupakan aspek yang dinamis dan perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang efektif, pelayanan yang berkualitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara analitis, legitimasi menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah karena peningkatan PAD sangat bergantung pada partisipasi dan kepatuhan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan masyarakat dapat menghambat efektivitas kebijakan pendapatan daerah. Oleh karena itu, legitimasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dapat dipandang sebagai bentuk nyata *political will* yang bertujuan menciptakan dukungan publik terhadap kebijakan peningkatan PAD.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil penelitian, *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator utama kemandirian fiskal. Faktor pertama yang mendukung adalah komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dalam menjadikan optimalisasi PAD sebagai prioritas pembangunan daerah. Komitmen tersebut terlihat dari konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, penguatan kelembagaan pengelola pendapatan, serta pengendalian belanja daerah secara lebih efisien. Dukungan kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah menjadi modal penting dalam mendorong implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Faktor pendukung berikutnya adalah adanya inovasi kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai inovasi melalui digitalisasi pelayanan perpajakan, pengembangan sistem pembayaran elektronik, program pelayanan langsung kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Inovasi tersebut membantu

meningkatkan efektivitas pelayanan, memperluas basis pajak, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terstruktur juga menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan *political will*. Pemerintah daerah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan daerah sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan peningkatan PAD. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Salah satu hambatan utama adalah masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Meskipun PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas sehingga kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri. Hambatan berikutnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan daerah belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Selain itu, masih terdapat objek pajak yang belum terdata secara menyeluruh sehingga mengurangi efektivitas kebijakan ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah daerah. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan sistem data dan informasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses pendataan, pengawasan, dan evaluasi potensi pajak daerah belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan dalam meningkatkan PAD. Beberapa aset daerah masih belum dimanfaatkan secara produktif sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola aset daerah agar dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Faktor penghambat lainnya adalah adanya resistensi sebagian masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah. Upaya penertiban objek pajak, perluasan basis pajak, maupun penguatan pengawasan sering kali menghadapi berbagai tantangan sosial yang memerlukan pendekatan persuasif dan komunikasi publik yang efektif agar kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi komitmen kepemimpinan, inovasi kebijakan, serta penguatan sistem perencanaan dan evaluasi, sedangkan faktor eksternal mencakup kapasitas fiskal daerah, kepatuhan wajib pajak, kualitas sistem informasi perpajakan, optimalisasi aset daerah, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal tergolong cukup kuat. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pembentukan Tim Optimalisasi PAD, pelaksanaan program *jemput bola* pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pembayaran pajak, penguatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta penerapan berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki komitmen normatif, tetapi juga melakukan tindakan nyata dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sama halnya dengan temuan

Giacchino & Kakabadse (2003), penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan *political will* sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa *political will* tercermin melalui komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial meskipun masih menghadapi berbagai kendala implementasi (Tarigan & Ginting,2020). Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen pimpinan daerah menjadi faktor utama dalam mendorong optimalisasi PAD sebagai salah satu instrumen peningkatan kemandirian fiskal. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ndlovu (2025) mengenai *political will* Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi stunting. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh adanya integrasi program lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai. Pada penelitian ini ditemukan kondisi yang serupa, yaitu adanya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah seperti Bapenda, BPKAD, Bapperida, dan Satpol PP dalam mendukung optimalisasi PAD (Uang,2025). Sinergi antarinstansi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi *political will* pemerintah daerah (Pitono & Kartiwi,2016). Selanjutnya, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Bebbington et al (2006) yang menemukan bahwa *political will* pemerintah desa dalam pemberdayaan petani aren tercermin dari komitmen pemimpin daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi lokal. Pada penelitian ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada penggalian potensi ekonomi daerah, termasuk sektor perkebunan, perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai sumber peningkatan PAD (Pitono et al,2023). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *political will* yang kuat mampu mendorong pemanfaatan potensi daerah secara lebih optimal. Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian AbouAssi et al (2021) yang menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh *political will* kepala daerah serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Dalam penelitian ini, peningkatan PAD tidak hanya didorong oleh kebijakan fiskal semata, tetapi juga melalui penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan pengawasan terhadap objek pajak daerah. Di sisi lain, penelitian ini memperkuat temuan Eckardt (2008) yang menyatakan bahwa rendahnya *tax effort* pada sebagian besar pemerintah daerah disebabkan oleh lemahnya kemauan politik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Berbeda dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya upaya yang relatif progresif melalui inovasi digitalisasi pajak, perluasan kanal pembayaran elektronik, serta pembentukan Tim Optimalisasi PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan *political will* dapat menjadi faktor penting dalam memperbaiki kapasitas fiskal daerah (Uang, et al,2023).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Temuan tersebut memperkuat sebagian besar hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komitmen kepemimpinan, inovasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan penguatan sistem pengawasan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan *political will*. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan berupa ketergantungan terhadap dana transfer pusat, keterbatasan basis pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara penuh. Temuan tersebut memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana implementasi *political will* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui kombinasi kebijakan inovatif, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik selama pelaksanaan penelitian mengenai *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu temuan yang menonjol adalah adanya kombinasi strategi konvensional dan strategi modern dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan penagihan dan pengawasan secara langsung melalui program *jemput bola* dan penertiban objek pajak, tetapi juga mengembangkan sistem digitalisasi perpajakan melalui aplikasi *Sentuh Pajak Kobar*, penggunaan *tapping box*, serta penyediaan berbagai kanal pembayaran pajak secara elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya adaptasi pemerintah daerah terhadap perkembangan teknologi sebagai instrumen peningkatan penerimaan daerah. Temuan menarik lainnya adalah adanya sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi PAD. Pembentukan Tim Optimalisasi PAD menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi melibatkan berbagai perangkat daerah seperti BPKAD, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah memandang peningkatan PAD sebagai agenda strategis yang memerlukan dukungan bersama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga dibarengi dengan kebijakan efisiensi belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengendalian terhadap berbagai pengeluaran yang dianggap kurang prioritas, seperti pembatasan perjalanan dinas dan pengurangan belanja operasional tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa *political will* dalam meningkatkan kemandirian fiskal diwujudkan tidak hanya melalui optimalisasi pendapatan, tetapi juga melalui pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa potensi ekonomi daerah yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit, pariwisata, perdagangan, dan jasa masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan kemandirian fiskal pada masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi-potensi tersebut melalui kebijakan yang inovatif, berkelanjutan, dan didukung oleh komitmen politik yang kuat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kemandirian fiskal telah menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi layanan perpajakan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan. Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu prioritas kebijakan yang didukung oleh mobilisasi sumber daya, penegakan regulasi, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta komitmen aktor politik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan indikator *political will* yang dikemukakan oleh Brinkerhoff (2000), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, meskipun tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi. Dengan demikian, *political will* pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan penguatan kemandirian keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi *political will* dalam meningkatkan kemandirian fiskal pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal dan potensi daerah yang berbeda. Kedua, penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga pengamatan terhadap implementasi kebijakan peningkatan kemandirian fiskal belum dapat menggambarkan seluruh dinamika yang terjadi dalam jangka panjang. Ketiga, penelitian lebih berfokus pada aspek *political will* pemerintah daerah berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Brinkerhoff (2000), sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji *political will* pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal pada daerah lain dengan karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang berbeda sehingga dapat diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengembangkan kajian dengan mengombinasikan aspek *political will*, kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan daerah, serta pengaruh kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian fiskal guna menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu, memberikan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian hingga penyusunan laporan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

AbouAssi, K., Bowman, A. O. M., Johnston, J. M., Bauer, Z., & Tran, L. (2021). Relations, resources, and costs: Exploring cross-sectoral collaboration at the local level in a developing country. *International Public Management Journal*, *24*(5), 646-672. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10967494.2020.1853292

Azizah, W. I., & Mahmudah, Z. (2020). Political will pemerintah daerah Kabupaten Jombang terhadap penanggulangan kemiskinan di masyarakat desa. *Jurnal Sosial Humaniora dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 87–102. https://www.academia.edu/download/96276296/pdf.pdf

Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World development*, *34*(11), 1958-1976. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X06001355

Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: an analytic framework. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, *20*(3), 239-252. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1099-162X(200008)20:3%3C239::AID-PAD138%3E3.0.CO;2-3

Christia, A. M. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*. https://www.academia.edu/download/69940433/pdf.pdf

Dalisawintri, S. E., Noor, H. M., & Irawan, B. (2025). *Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)*. Nas Media Pustaka.

Giacchino, S., & Kakabadse, A. (2003). Successful policy implementation: the route to building self-confident government. *International Review of Administrative Sciences*, *69*(2), 139-160. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852303069002002

Halim, A. (2017). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hasanah, N., Masdar, R., & Furqan, A. C. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *9*(4), 2950-2963. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788

Mendrofa, H. M. H., & Sonuari, M. I. S. M. I. (2025). Political Will Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kebijakan dan Implementasi. *Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy, and Social Innovations*, *1*(1), 46-52. https://ojs.konsuli.com/konsepsi/article/view/17

Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, *12*(1), 56-71. https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.05

Ndlovu, N. P. (2025). Cross-sectoral coordination in the implementation of agroforestry in Malawi. *Frontiers in Forests and Global Change*, *8*, 1533326. https://doi.org/10.3389/ffgc.2025.1533326

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 107-123. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1429/

Pitono, A., & Kartiwi, K. (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 27-37. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1434/1/505-Article%20Text-1283-1-10-20190522.pdf

Pratiwi, K., & Nurjanah, S. (2025). Evaluasi Sistem Manajemen Persediaan untuk Mencegah Stockout Dan Mencapai Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Industri Distribusi Listrik). *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, *12*(1), 206-214. http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisocio/article/view/4526

Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. K. (2020). The Determinants of Level of Society Welfare Within Fiscal Decentralization Framework In Regional Autonomy Era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 60-70. https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.10545

Tarigan, M. H., & Ginting, A. H. (2020). Model Organisasi Sekretariat Dewan dalam Mendukung Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Lampung. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 5(1), 51-66. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1003

Uang, D. P. (2025). Decentralization Politics in Southeast Asia: A Narrative Literature Review of Institutional, Political, and Economic Dimensions (2014–2024). *Journal of Social Research*, *4*(12), 3332-3348. http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/2865

Uang, D. P., Jalesy, N. M., Situmorang, A., & Elvis, E. (2023). Developing credible government leadership: Indonesian public policy views. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 197-213. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3742

Shen, S. V. (2025). Political will as a source of policy innovation. *Policy Studies Journal*, *53*(1), 185-200. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/psj.12571

Wijaya, A. B., Anisa, R., Loy, M. H., & Ranti, M. M. (2023). Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, *7*(2), 134-146. https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/404

Yusri, A. (2019). Pengembangan political will pemerintah desa memberdayakan petani aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah*, *6*(1), 55–67. https://www.academia.edu/download/96276296/pdf.pdf

Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *7*(2). https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/137